

Pemkot Cirebon Berhasil Kurangi Angka Pengangguran Jadi 7,66 Persen

CIREBON (IM) - Pemerintah Kota Cirebon, Jawa Barat, berhasil mengurangi tingkat pengangguran terbuka (TPT) dari angka 8,42 persen pada 2022 menjadi 7,66 persen di 2023 berkat sejumlah program strategis ketenagakerjaan yang dilaksanakan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cirebon, Agus Suherman di Cirebon, Selasa (5/12), mengatakan program strategis untuk menekan angka pengangguran itu meliputi serangkaian kegiatan seperti ekspansi job fair di perguruan tinggi hingga peningkatan kualitas angkatan kerja pada bursa kerja khusus (BKK).

Selain program tersebut, pihaknya memanfaatkan Lembaga Penyelenggara Kerja (LPK) Tripartit dan melakukan koordinasi dengan Dewan Pengupahan Kota agar tingkat pengangguran di daerahnya berkurang.

"Kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan itu seperti ekspansi job fair dengan beberapa perguruan tinggi di Kota Cirebon, peningkatan kualitas angkatan kerja pada BKK serta peningkatan peran

LPK Tripartit," kata Agus. Ia menyebut angka TPT itu diperoleh dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat. Merujuk pada data tersebut, tingkat pengangguran di Kota Cirebon sempat menyentuh angka tertinggi pada 2020 sebesar 10,97 persen. Namun di 2021 berkurang kembali menjadi 10,53 persen.

Jika melihat data tersebut, artinya tingkat pengangguran di Kota Cirebon secara perlahan mulai menunjukkan penurunan berkat program strategis yang dilakukan Disnaker.

"Selain itu, kami akan terus gencar mengadakan sosialisasi, terutama soal Tenaga Kerja Indonesia (TKI), jangan sampai terjebak jadi pekerja ilegal, terutama bagaimana cara kerja ke luar negeri yang aman sesuai aturan," katanya.

Agus menjelaskan sepanjang tahun 2023, tingkat realisasi kegiatan yang dilaksanakan Disnaker Kota Cirebon sudah mencapai 70,52 persen. Dari semua penerapan program itu, ia meminta dukungan pemerintah agar pengadaan maupun peningkatan sumber daya manusia (SDM) di daerahnya dapat terus berjalan. ● pra

Hadapi Bencana Musim Hujan, BPBD Kabupaten Tangerang Siapkan Hal Ini

TANGERANG (IM) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tangerang terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi.

Kepala BPBD Kabupaten Tangerang, Ujat Sudrajat, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan sebanyak 80 personel setiap hari di 12 pos BPBD Kabupaten Tangerang untuk mengantisipasi ancaman bencana hidrometeorologi. "Juga ditambah dengan tiga orang personel Pusdalops yang selalu siaga 24 jam menerima panggilan kedaruratan," ungkapnya, Selasa (5/12).

Menurutnya, saat ini banjir dan badai bisa saja datang, ditambah cuaca ekstrem juga tengah melanda sebagian besar wilayah di Kabupaten Tangerang.

"Oleh karena itu, BPBD Kabupaten Tangerang sedang melakukan mitigasi bencana, seperti banjir secara terpadu dengan melibatkan perangkat daerah terkait," ujarnya.

Selain itu, kata Ujat, puluhan personel BPBD Kabupaten Tangerang dan peralatan kedaruratan bencana seperti perahu karet, pompa air, dan dapur logistik juga telah disiapkan untuk menghadapi situasi bencana yang bisa datang kapan saja.

"Nah, berikut logistik

untuk kedaruratan juga sudah disiapkan dan jika diperlukan nanti akan segera kita salurkan sesuai dengan kebutuhan," terangnya.

Kata Ujat, dalam melakukan mitigasi bencana, BPBD juga telah melakukan peningkatan kapasitas masyarakat dalam penanganan kedaruratan bencana, seperti dengan menyiapkan titik kumpul, tempat evakuasi, jalur evakuasi, serta membentuk kelompok siaga bencana di desa.

"Di sisi lain kami juga telah memiliki kelompok siaga bencana di setiap desa, mereka juga kami imbau untuk proaktif memberikan informasi terkait dengan kejadian maupun membantu proses penanggulangan bencana," katanya.

Selain itu, tambah Ujat, BPBD Kabupaten Tangerang juga sudah mulai menetapkan lokasi rawan banjir, yang saat ini terdapat lima kecamatan yang masuk lokasi titik sangat rawan banjir.

Di antaranya, adalah Kecamatan Teluknaga, Kecamatan PasarKemis, Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Cisoka, dan Kecamatan Balaraja. "Makan-latan kedaruratan bencana seperti perahu karet, pompa air, dan dapur logistik juga telah disiapkan untuk menghadapi situasi bencana yang bisa datang kapan saja.

Yedi Rahmat Resmi Jabat Pj Wali Kota Serang

SERANG (IM) - Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, Yedi Rahmat, resmi menjabat Penjabat Wali Kota Serang, Banten. Prosesi pelantikan dipimpin langsung Penjabat Gubernur Banten, Al Muktabar di Pendopo Gubernur Banten, Kota Serang, Selasa (5/12). Hadir pula Wali Kota Serang periode 2017-2023 Syafrudin.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota, Subadri telah resmi mengundurkan diri pada 1 November 2023 karena maju pada kontestasi Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024. Yedi Rahmat sendiri dilantik menjadi Wali Kota Serang untuk mengisi kekosongan hingga terpilih kepala daerah baru. Sebab, masa jabatan Syafrudin telah resmi berakhir hari ini, Selasa (5/12).

Yedi Rahmat dilantik berdasarkan Surat Keputusan Mendagri Nomor 100.2.1.3-6240 tertanggal 30 November 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Wali Kota Serang. "Saya sebagai penjabat Gubernur Banten atas nama Presiden Republik Indonesia dengan resmi melantik saudara Yedi Rahmat sebagai Penjabat Wali Kota Serang," kata Al Muktabar saat melantik Yedi Rahmat.

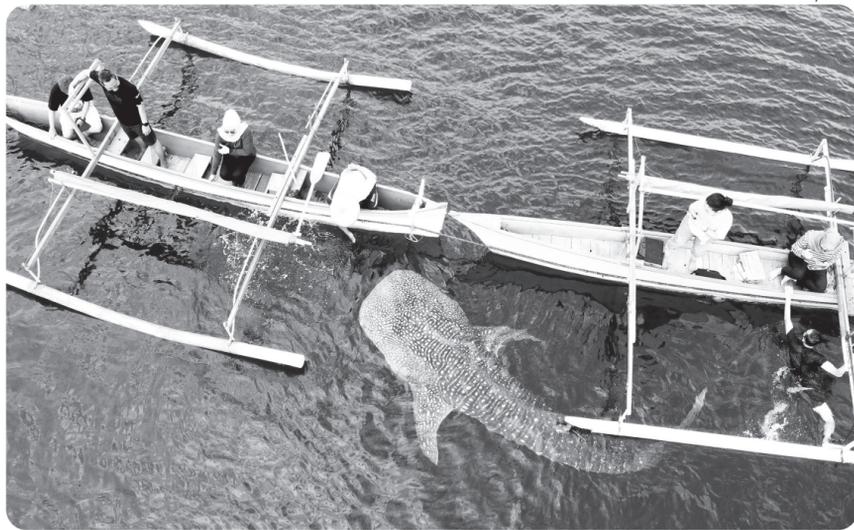
Dalam SK Mendagri, Yedi

Rahmat dilarang melakukan pengisian jabatan pejabat dan mutasi pegawai. Membatalkan perizinan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya, atau mengeluarkan perizinan berbeda dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya. Membuat kebijakan pemekar daerah dan membuat kebijakan yang berbeda dengan program pembangunan pejabat sebelumnya.

"Larangan dapat dicucukan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri," dikutip dari SK pengangkatan Pj Wali Kota Serang.

Yedi Rahmat diminta untuk memfasilitasi persiapan pelaksanaan Pemilu 2024 serta menjaga netralitas ASN. Serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Mendagri melalui Gubernur paling sedikit 3 bulan. Sedangkan masa jabatan penjabat wali kota Serang paling lama 1 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Dalam proses pelantikan, turut hadir sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Serang dan Pemprov Banten.

"Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan," tandas Al Muktabar. ● pra



IDN/ANTARA

JUMLAH INDIVIDU HIU PAUS DI GORONTALO

Sejumlah wisawata melihat Hiu Paus (Rhincodon Typus) dengan menggunakan perahu wisata di pantai Desa Botubarani, Kab. Bone Bolango, Gorontalo, Selasa (5/12). Sejak 2016 hingga Desember 2023 tercatat sebanyak 59 individu yang dapat diidentifikasi dari corak totol di badan hiu paus.

Penebangan Liar di Kawasan Danau Toba Diduga Penyebab Banjir Humbahas

Dugaan adanya penebangan liar atau penggundulan hutan di perbukitan Danau Toba diyakini menjadi faktor utama terjadinya banjir bandang dan longsor di Desa Simangulampe. Hutan yang rusak tidak mampu menahan air ketika hujan deras terjadi.

HUMBANG HASUNDUTAN (IM) - Bencana alam berupa banjir bandang yang disertai longsor melanda permukiman penduduk di Desa Simangulampe, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatera Utara, diduga disebabkan oleh aktivitas penebangan liar di perbukitan Danau Toba.

Informasi ini didukung

oleh rekaman video drone yang dimiliki oleh aktivis lingkungan dan postingan dari pimpinan gereja HKBP dan Bupati Humbang Hasundutan.

Dalam rekaman video drone yang diperoleh, kondisi perbukitan di sekitar Danau Toba terlihat telah gundul, dengan puluhan pohon ditebang. Video tersebut menunjukkan jejak penebangan hutan di perbukitan Danau Toba, mengi-

kuti aliran material bencana banjir bandang dan longsor dari hulu ke hilir, bahkan masuk ke permukiman warga.

Dugaan adanya penebangan liar atau penggundulan hutan di perbukitan Danau Toba diyakini menjadi faktor utama terjadinya banjir bandang dan longsor di Desa Simangulampe. Hutan yang rusak tidak mampu menahan air ketika hujan deras terjadi.

Koordinator Studi Advokasi Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), Rocky Pasaribu, mengatakan bahwa bencana banjir bandang dan longsor di Desa Simangulampe diduga disebabkan oleh penebangan hutan di perbukitan Danau Toba, khususnya di Desa Simangulampe, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang Hasundutan.

"Peristiwa yang terjadi di Desa Simangulampe pada 1 Desember lalu kami sebut sebagai bencana ekologis karena kemarin kami melakukan pemantauan secara langsung menggunakan drone terlihat di hulu Desa Simangulampe sudah mengalami kerusakan hutan. Itu juga dibuktikan banyaknya gelondongan kayu yang terbawa longsor sampai ke pinggir Danau Toba," kata Rocky, Selasa (5/12).

Rocky juga menyampaikan keprihatinannya terhadap kerusakan hutan tersebut, dan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dapat berdampak serius bagi masyarakat. Ia mengesankan bahwa jika kerusakan ini tidak ditangani dengan serius, kemungkinan terjadinya bencana banjir bandang atau longsor dapat terulang.

"Sampai sejauh ini belum

bisa kita pastikan siapa yang melakukan perusakan hutan di hulu perbukitan itu, apakah masyarakat atau perusahaan. Namun yang pasti, beberapa kayu yang kita lihat di hilir tampaknya milik sebuah perusahaan yang beroperasi di kawasan Danau Toba," tambahnya.

Perlu diingat bahwa bencana banjir bandang di Desa Simangulampe, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang Hasundutan, pada tanggal 1 Desember lalu telah merusak setidaknya 12 rumah warga. Hingga saat ini, tim gabungan Basarnas, SAR, TNI, Polri, BPBD, dan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan masih melakukan pencarian terhadap 10 warga yang masih hilang. ● pra

BAN-S/M Provinsi Jabar Makin Melaju

BANDUNG (IM) - Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) Provinsi Jawa Barat menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) II Tahun 2023 dengan tema "Optimalisasi Tindak Lanjut Hasil Akreditasi untuk Peningkatan Mutu Sekolah dan Madrasah".

Rakorda II bertujuan untuk menyampaikan hasil akreditasi dan rekomendasi serta diskusi strategi peningkatan mutu satuan pendidikan melalui tindak lanjut hasil akreditasi sekolah/madrasah.

Pada Rakorda II ini juga digelar "Seminar dan Ekspose Hasil Akreditasi Tahun 2023" yang diikuti 54 sekolah/madrasah dari kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

Kegiatan Rakorda II dilaksanakan tanggal 28-30 November 2023 di Harris Hotel & Conventions Festival Citylink Bandung dan dihadiri oleh Perwakilan BAN PDN Pusat, Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi I s.d. XIII, Kepala Dinas Pendidikan kab./kota se-Jawa Barat.

Kemudian, Kepala Kantor Kemenag kab./kota se-Jawa Barat, Executive Vice President Telkom Regional III Jawa Barat, Koordinator Pelaksana Akreditasi (KPA) se-Jawa Barat serta kepala sekolah/madrasah peserta ekspose.

Rekomendasi dan program tindak lanjut hasil akreditasi merupakan salah satu



bentuk evaluasi eksternal yang dilakukan asesor BAN-S/M yang bertujuan meningkatkan dan mengembangkan mutu sekolah/madrasah secara berkelanjutan.

Rencana tindak lanjut (RTL) yang harus dibuat oleh seluruh S/M yang telah divisitasi merupakan salah satu upaya untuk mendorong dan memastikan S/M melakukan peningkatan kinerja secara berkesinambungan.

Hasil capaian proses akreditasi yang menunjukkan tingkat mutu yang dimiliki oleh sekolah/madrasah harus

disebarluaskan kepada publik sebagai acuan peningkatan mutu pendidikan selanjutnya.

Sekolah/madrasah yang telah meraih kinerja atau mutu terbaik harus dapat menunjukkan prestasi dan berbagi dengan sekolah/madrasah lainnya.

Berbagai praktik baik dari hasil akreditasi tahun 2023 disampaikan dalam Seminar dan Ekspose Sekolah/Madrasah terbaik dari kota/kabupaten di Provinsi Jawa Barat.

Inilah salah satu langkah nyata untuk menunjukkan kepada masyarakat atas raihan

predikat unggul di sekolah/madrasah dan mereka memang layak mendapatkan "Terakreditasi A".

Dalam sambutannya, Ketua BAN-S/M Provinsi Jawa Barat, Drs. Totoh Santosa MM, menyampaikan kegiatan visitasi akreditasi tahun 2023 dan kegiatan lainnya yang telah dilaksanakan sesuai target di tahun 2023. Di Jawa Barat, ada 4.068 sekolah/madrasah sasaran akreditasi dengan perolehan nilai A (59%), B (38%), C (3%), dan TT (<1%).

Tentunya ini patut diapresiasi dengan jumlah seko-

lah/madrasah dan asesor terbanyak di Indonesia dapat menuntaskan Visitasi Akreditasi 2023 dengan cepat dan hasil yang memuaskan.

Hal ini diakui oleh perwakilan dari BAN-PDM Pusat, Dr. Muhamad Yusro, SPd MI yang dalam sambutannya menyatakan bahwa BAN-S/M Provinsi Jawa Barat sudah melangkah lebih cepat dan merealisasikan semua rencana program di tahun 2023.

Tentunya ini patut dicontoh oleh BAN-S/M dari provinsi lainnya dan beliau menyampaikan juga kebijakan Akreditasi 2024.

Tak luput, peranan/tugas Koordinator Pelaksana Akreditasi (KPA) di Rakorda II ini membantu BAN-S/M provinsi dalam mendukung pelaksanaan program akreditasi mulai dari persiapan, pelaksanaan maupun tindak lanjut hasil akreditasi.

Dalam kegiatan ini juga ada pameran pendidikan dari 54 sekolah yang memperoleh nilai akreditasi terbaik dari tingkatan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA/MAK dari perwakilan 27 kota dan kabupaten di Jawa Barat.

Selanjutnya, ada pula acara seminar dan paparan praktik baik/ekspose dari sekolah/madrasah yang terpilih mewakili setiap jenjang serta pentas seni; paduan suara, tarian rampak, hadroh, angklung, dan silat. ● lys

Forum RPJPD Harus Jadi Sarana Rumuskan Cita-cita Kabupaten Bogor di Tahun 2045

Bogor

45



Bupati Bogor meminta forum RPJPD harus jadi sarana rumuskan cita-cita Kabupaten Bogor di Tahun 2045.

BOGOR (IM) - Bupati Bogor, Iwan Setiawan menyambut baik menuju Indonesia Emas tahun 2045. Karena itu, Forum Kon-

sultasi Publik RPJPD ini menjadi sarana untuk mengkomodir masukan, saran, kritikan dan harapan dari seluruh pemangku kepentin-

gan dalam merumuskan cita-cita Kabupaten Bogor untuk tahun 2045 mendatang.

Hal ini ia katakan saat membuka Forum Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor tahun 2025-2045, di Gedung Tegar Beriman, Cibinong, Senin (4/12).

Pada kesempatan tersebut diluncurkan Data Ranger oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang).

Kewenangan daerah berdasarkan bidang urusan dan posisi daya saing daerah, baik secara nasional, Jawa Barat, maupun dengan wilayah

perbatasan.

"Semoga para undangan yang hadir dapat mengikuti kegiatan ini dengan seksama, para pemangku kepentingan harus dapat berpartisipasi aktif dalam proses ini, sehingga semua tahapan penyusunan RPJPD 2025-2045 dapat berjalan efektif, efisien dan tepat waktu sesuai jadwal," ungkap Iwan Setiawan.

Soal peluncuran Data Ranger, Bupati Iwan Setiawan menerangkan, ini sebagai bentuk pemberian motivasi, penghargaan untuk pejuang data. Orang-orang yang dipilih menjadi para petugas data di lingkup Pemkab Bogor yang sehari-hari mengumpulkan dan mengolah data.

"Kita ingin para petugas ini bisa bekerja fokus dan ke depan insya Allah akan kita berikan penghargaan. Saya juga minta para kepala dinas dan camat untuk memberikan dukungan kepada para petugas yang diberikan mandat untuk mencari dan mengelola data," terang Iwan.

Ia menambahkan cita-citanya adalah, Kabupaten Bogor memiliki big data, karena data itu sangatlah penting untuk merumuskan kebijakan dan mengambil keputusan. Kalau kita memiliki data yang baik, insya Allah kebijakan yang diambil akan baik. ● gio